

GAGASAN INDONESIA MENGENAI INDO-PACIFIC TREATY: PROSPEK DAN MASALAH

THE INDONESIA IDEA OF INDO-PACIFIC TREATY: PROSPECTS AND PROBLEMS

Agung Citra Purnama ¹

Alumni Universitas Pertahanan Indonesia
(acit.hamid@gmail.com)

Abstrak – Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang menjadi perhatian dunia saat ini, karena kekuatan di bidang politik, ekonomi dan militer dari negara-negara yang ada didalam kawasan tersebut. Permasalahan keamanan yang terjadi di kawasan tersebut menjadi perhatian dunia dan Indonesia merasa perlu berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan. Oleh karena itu, melalui mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Indonesia mengajukan sebuah gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation* untuk menjaga keamanan kawasan. Artikel ini bermaksud mengetahui makna dan tujuan gagasan pembentukan traktat ini, serta prospek dan masalah dalam mewujudkannya. Di akhir penelitian ditemukan simpulan bahwa gagasan dan tujuan dari pembentukan *Indo-Pacific Treaty* ini adalah menciptakan mekanisme untuk mempromosikan cara damai dan saling percaya dengan tidak menggunakan cara pengerahan kekuatan militer dan tidak merugikan pihak-pihak lain di dalam kawasan. Walaupun untuk saat ini prospek mewujudkan gagasan ini masih kecil dikarenakan adanya sejumlah masalah yang menghadang, namun gagasan ini tetap dapat diwujudkan di masa depan dengan menggunakan strategi yang mendapat dukungan dari negara-negara lain di kawasan.

Kata Kunci : gagasan, *indo-pacific treaty*, prospek, masalah, keamanan kawasan, kerjasama keamanan

Abstract – *Indo-Pacific region is an area of concern for the world today, because of the power in politics, economics and military of the countries that are in this region. Security problems that occur in this region become the attention of the world and Indonesia felt it necessary to play an active role in establishing peace and security in the region. Therefore, through the former Minister of Foreign Affairs Marty Natalegawa, Indonesia proposed the idea of establishment an Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation for maintaining regional security. This article intends to determine the meaning and purpose of the idea of this treaty, as well as the prospects and problems in realizing them. In conclusion, the idea and the purpose of the establishment of Indo-Pacific Treaty is to create mechanisms to promote peaceful means and mutual trust without deployment of military force and harming other parties in the region. Although for now the prospect of realizing this idea is still small due to a number of problems facing, but this idea can still be realized in the future by using a strategy that has the support of other countries in the region.*

Keywords: *idea, indo-pacific treaty, prospects, problems, regional security, security cooperation*

¹ Agung Citra Purnama, M.Si (Han) lulus dari Program Studi Magister Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia pada tahun 2016. Pada bulan November 2015 pernah mengikuti *Defense Management Course* selama dua minggu di *Naval Postgraduate School (NPS)*, Monterey, California, Amerika Serikat.

Pendahuluan

Kawasan Asia Pasifik yang terbentang luas dari benua Asia hingga benua Amerika dan memiliki daerah yang berbatasan dengan Samudra Pasifik merupakan kawasan yang menjadi perhatian dunia saat ini. Di kawasan Asia Pasifik ini, terdapat empat negara besar yang memiliki kekuatan di bidang politik, ekonomi dan militer serta berpengaruh bagi kawasan besar tersebut adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina dan Rusia.

Selain empat negara besar tersebut, di kawasan Asia Pasifik juga terdapat *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang merupakan asosiasi sepuluh negara Asia Tenggara yang bergabung membentuk komunitas untuk kepentingan bersama dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi serta sosial budaya². Dengan bergabungnya sepuluh negara Asia Tenggara dalam satu komunitas menjadikan ASEAN sebagai organisasi subregional di Asia Pasifik yang berpengaruh dan diperhitungkan oleh negara-negara besar maupun negara lainnya di kawasan Asia Pasifik.

Saat ini terdapat beberapa kejadian dan momentum penting yang terjadi di kawasan Asia Pasifik yang menjadi perhatian banyak negara di dunia. Beberapa kejadian tersebut diantaranya adalah sengketa perebutan wilayah di Laut Cina Selatan, di Laut Cina Timur,

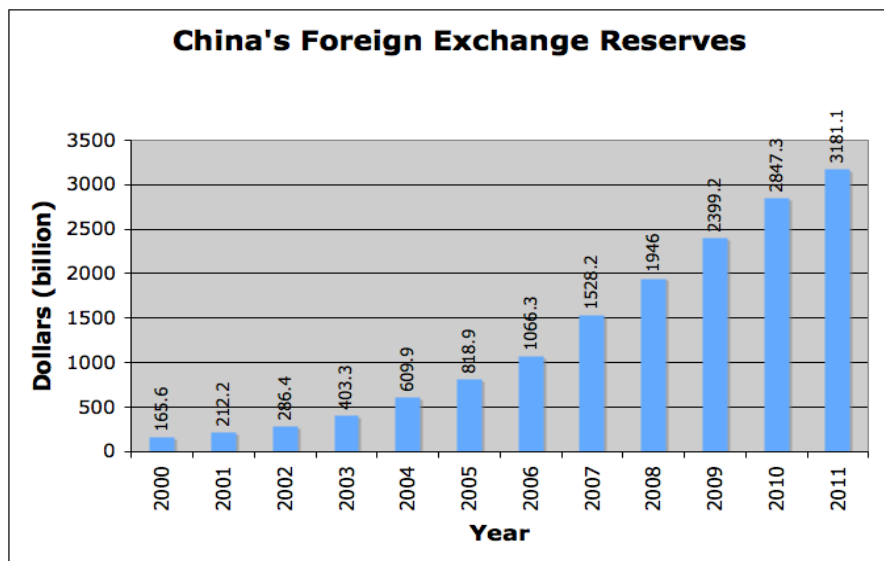
² "ASEAN Overview", Association of Southeast Asian Nations, dalam <http://www.asean.org/asean/about-asean/overview>, diunduh pada 23 Juli 2015.

kebangkitan Cina dan meningkatnya anggaran pertahanan beberapa negara di Asia Pasifik. Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan melibatkan enam negara yang berbatasan di wilayah tersebut. Enam negara tersebut yakni Cina, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia dan Vietnam. Sengketa ini dimulai dari klaim Cina atas Laut Cina Selatan (termasuk didalamnya wilayah kepulauan Parcel dan kepulauan Spratly) yang melibatkan lima negara lainnya yang merasa wilayah teritorinya diklaim oleh Cina. Wilayah yang menjadi sengketa menjadi penting karena wilayah tersebut banyak mengandung sumber daya potensial seperti ikan, minyak bumi dan gas alam, serta merupakan wilayah strategis sebagai jalur pelayaran internasional yang banyak dilalui oleh kapal-kapal³. Jika sengketa ini terus berlanjut dan berkembang menjadi pengerahan kekuatan militer, maka akan menjadi ancaman bagi negara-negara lain yang berkepentingan dengan jalur perdagangan yang melewati kawasan Laut Cina Selatan ini.

Di wilayah lain di Asia Pasifik, tepatnya di Laut Cina Timur, Cina dan Jepang juga memiliki sengketa perebutan klaim kedaulatan atas pulau-pulau kosong di Laut Cina Timur, yakni di kepulauan Senkaku/Diaoyu. Klaim kedua negara tersebut menyebabkan kedua negara sama-sama berupaya membangun kekuatan militer guna

³ Emmanuel Yujuico, "The Real Story behind the South China Sea Dispute", LSE Idea, dalam http://www.lse.ac.uk/IDEAS/pdf/SEAPpdf/SA_southchinaseadispute.pdf, diunduh pada 28 April 2015.

Gambar 1. Cadangan Devisa Negara Cina Tahun 2000 – 2011



Sumber: <http://viableopposition.blogspot.com/2012/03/chinas-holdings-of-us-treasuries-what.html>

melindungi dan mencapai kepentingan keamanan nasionalnya di wilayah yang disengketakan tersebut⁴.

Kebangkitan Cina di bidang ekonomi menjadi fenomena tersendiri di kawasan Asia Pasifik, karena dari perekonomian yang kuat inilah, Cina dapat meningkatkan kekuatan militernya di Asia Pasifik. Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa cadangan devisa Cina terus meningkat, dari sebesar US\$ 165,6 miliar pada tahun 2000 menjadi sebesar US\$ 3.181,1 pada tahun 2011⁵. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Cina sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 stabil di atas angka 7% (lihat gambar 2)⁶.

⁴ Mur Mallarani, "Krisis Keamanan dan Eskalasi Politik di Asia Timur", Jurnal Mallarani, dalam <http://jurnalmallarani.blogspot.com/2014/01/krisis-keamanan-dan-eskalasi-politik-di.html>, diunduh pada 4 Mei 2015.

⁵ "China's Holdings of U.S. Treasuries - What Does The Future Hold?", Viable Opposition, dalam <http://viableopposition.blogspot.com/2012/03/chinas-holdings-of-us-treasuries-what.html>, diunduh pada 24 Juli 2015.

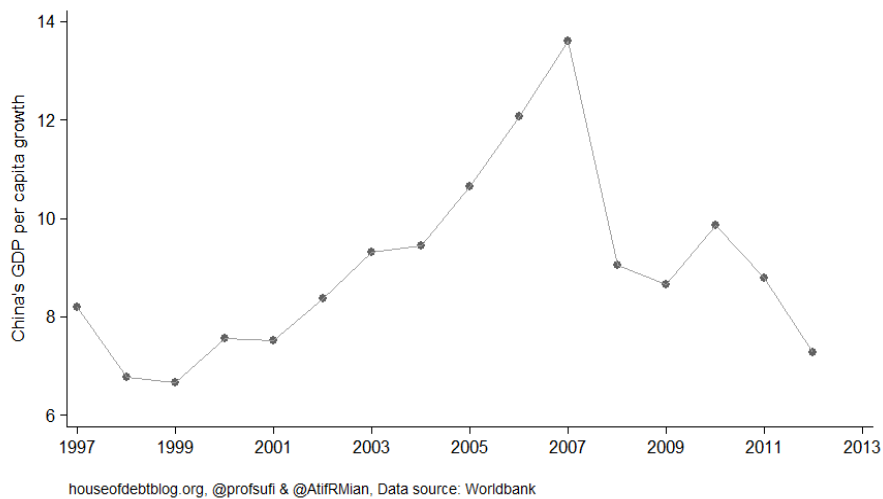
⁶ Atif Mian dan Amir Sufi, "China and the Dangers of Debt", House of Debt, dalam <http://houseofdebt.org/2014/03/13/china-and-the-dangers-of-debt.html>, diunduh pada 24 Juli 2015.

Dari kebangkitan sektor ekonomi tersebut, Cina kemudian bisa meningkatkan kekuatannya di sektor pertahanan. Tercatat pada tahun 2014, anggaran pertahanan Cina sebesar US\$ 129,4 miliar dan merupakan negara dengan anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (sebesar US\$ 581 miliar) serta berada di atas dua negara besar lainnya di Asia Pasifik, yakni Rusia (sebesar US\$ 70 miliar dan berada diposisi ke empat) dan Jepang (sebesar US\$ 47,7 miliar dan berada di posisi ke tujuh) (lihat gambar 3)⁷.

Di kawasan Asia Pasifik, selain Cina yang anggaran sektor pertahanannya diperkirakan naik sebesar 18,8% pada tahun 2015, negara-negara lainnya

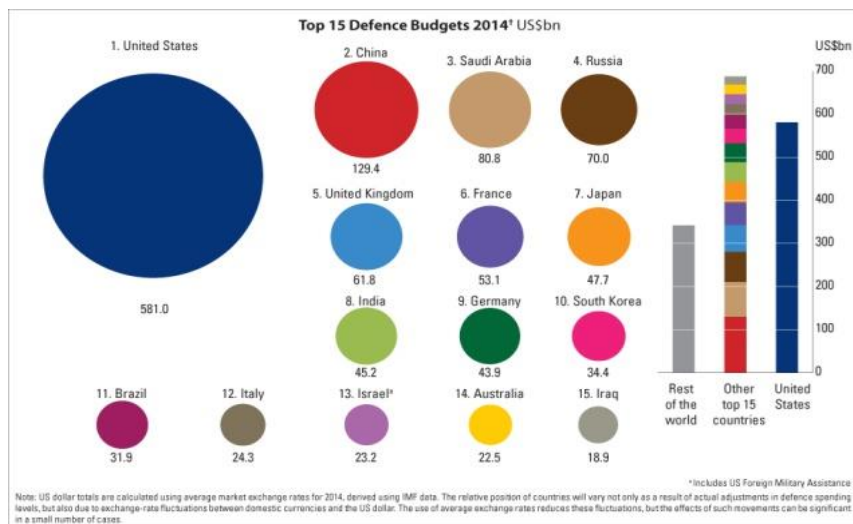
⁷ Giri Rajendran, "Defence Budgets - Devil in The Detail", The International Institute for Strategic Studies, dalam <https://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2015-090c/february-8272/2014-top-defence-spenders-bb5d>, diunduh pada 24 Juli 2015.

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Cina Tahun 1997 – 2013



Sumber: <http://houseofdebt.org/2014/03/13/china-and-the-dangers-of-debt.html>

Gambar 3. Top 15 Budget Pertahanan di Dunia Tahun 2014



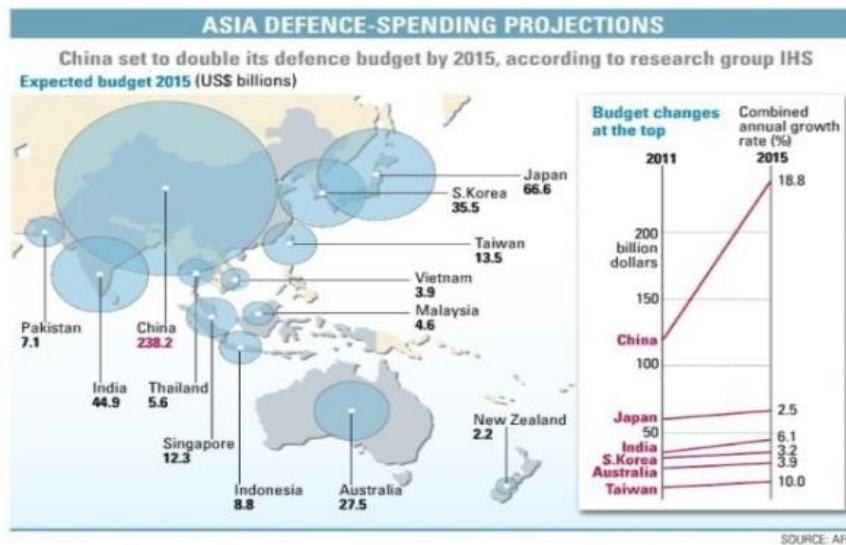
Sumber: <https://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2015-09c/february-8272/2014-top-defence-spenders-bb5d>

juga meningkatkan anggaran sektor pertahanannya pada tahun 2015, seperti Jepang (meningkatkan 2,5% anggaran sektor pertahanan), Korea Selatan (meningkatkan 3,2% anggaran sektor pertahanan), Australia (meningkatkan 3,9% anggaran sektor pertahanan) serta Taiwan (meningkatkan 10% anggaran sektor pertahanan) (lihat gambar 4)⁸.

⁸ "Asia Defence Spending Projections", Big Talk Money, dalam <https://bigtalkmoney.wordpress.com/2012/02/15/asia-defence-spending->

Kawasan Asia Pasifik di abad ke-21 ini menghadapi isu-isu keamanan baik tradisional maupun isu-isu keamanan nontradisional yang mengganggu hubungan antara negara-negara sekawasan dan tidak dapat dihindari lagi telah berkembang. Karena bercampurnya isu-isu keamanan tersebut yang dihadapi di kawasan Asia Pasifik, maka strategi yang selama ini dipakai, berupa dialog-projections/, diunduh pada 24 Juli 2015.

Gambar 4. Perkiraan Anggaran Pertahanan di Asia Tahun 2015



Sumber: <https://bigtalkmoney.wordpress.com/2012/02/15/asia-defence-spending-projections/>

dialog dalam beberapa kerjasama keamanan seperti dialog-dialog yang dilakukan dalam ASEAN Regional Forum (ARF), dianggap sudah tidak memadai untuk menghadapi tantangan keamanan yang sekarang dihadapi di kawasan⁹.

Isu-isu keamanan yang sekarang ini menarik perhatian diantaranya permasalahan di Semenanjung Korea pasca Perang Dingin, sengketa Laut Cina Selatan, ketegangan bilateral antar negara-negara Asia Timur, sengketa perbatasan antar beberapa negara Asia Tenggara, tumbuhnya gerakan terorisme, perdagangan narkoba dan pencucian uang, serta masalah keamanan insani (*human security*). Kombinasi isu keamanan tersebut memunculkan kebutuhan akan strategi keamanan yang baru untuk melengkapi pendekatan strategi keamanan yang sudah ada, yang mungkin saja bermanfaat untuk digunakan pada

⁹ Amitav Acharya dan See Seng Tan, *Asia-Pacific Security Cooperation*, (New York: M.E. Sharpe, 2004).

suatu wilayah dan suatu periode tertentu, namun sekarang memerlukan beberapa formulasi ulang¹⁰.

Pada dekade 90an, terdapat sejumlah perkembangan yang penting yang mengubah desain arsitektur keamanan di kawasan Asia Pasifik dan salah satunya yang penting dan dianggap sebagai sebuah sumber utama perubahan tersebut adalah pembentukan ARF pada tahun 1993. ARF merupakan puncak dari timbulnya ide-ide dan inisiatif baru untuk pembentukan forum multilateral untuk keamanan kawasan. ARF merupakan satu-satunya forum multilateral yang membahas masalah keamanan di Asia Pasifik¹¹.

ARF dibentuk pada pertemuan ke-26 dari ASEAN Ministerial Meeting and Post Ministerial Conference yang diadakan di Singapura pada tanggal 23 – 25 Juli 1993. Kemudian pada 25 Juli 1994 diadakan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

pertemuan perdana ARF di Bangkok. Tujuan dari pembentukan ARF seperti yang dirancang pada *ARF Chairman's Statement* yang pertama pada 1994 adalah untuk mendorong dialog yang konstruktif dan konsultasi tentang isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama. Selain itu, bertujuan untuk membuat kontribusi yang signifikan terhadap upaya-upaya menuju pembangunan kepercayaan dan diplomasi yang bersifat preventif di wilayah Asia Pasifik. Dalam *ASEAN Ministerial Meeting* yang ke-27 pada 1994, dinyatakan juga bahwa ARF bisa menjadi forum konsultatif yang efektif di kawasan Asia Pasifik dalam mempromosikan dialog terbuka untuk kerjasama di bidang politik dan keamanan di kawasan regional tersebut. Untuk mewujudkannya, ASEAN harus bekerjasama dengan mitra ARF untuk membawa pola hubungan di kawasan Asia Pasifik yang lebih bisa diprediksi dan konstruktif. Saat ini negara-negara atau organisasi yang berpartisipasi dalam ARF ada sebanyak 27 partisipan¹².

Pencapaian yang telah ARF lakukan diantaranya adalah ARF berhasil mengajak negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang dan Rusia untuk menjadi partisipan dalam ARF. Hal ini menguntungkan karena dengan bergabungnya negara besar tersebut, memungkinkan ARF bersama dengan negara-negara lain untuk mengadakan dialog dan menemukan solusi atas

¹² "About The ASEAN Regional Forum", ASEAN Regional Forum, dalam <http://aseanregionalforum.asean.org/about.html>, diunduh pada 23 Juli 2015.

permasalahan politik dan keamanan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik, sehingga bisa menghindari munculnya pengerahan kekuatan ataupun perang secara terbuka yang disebabkan oleh permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Pencapaian lainnya yang dikutip dari Beckman oleh Aisarieva adalah ARF sampai tahun 2009 berhasil membuat permasalahan sengketa Laut Cina Selatan tidak sampai menimbulkan konflik terbuka antar negara-negara yang terlibat sengketa tersebut dan salah satu alasan utamanya adalah karena ARF dapat mengajak Cina untuk menyetujui berdialog dengan ASEAN dalam menciptakan pencegahan konflik, walaupun ARF masih harus melanjutkannya dari pencegahan konflik menjadi kerjasama yang berarti dalam menyelesaikan sengketa tersebut¹³. Seperti yang dikemukakan oleh Aisarieva di atas bahwa ARF masih terbatas dalam menyelesaikan konflik yang ada di Asia Pasifik¹⁴. Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif untuk pembentukan mekanisme kerjasama keamanan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN diharapkan bisa berperan lebih dengan menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan global, termasuk di kawasan Asia Pasifik. Dalam hal ini, Indonesia dapat berperan sebagai penengah dalam permasalahan

¹³ Almagul Aisarieva, "ASEAN and Security Institution: Focusing on ASEAN Regional Forum and the ASEAN Political-Security Community", dalam <http://r-cube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/4743/1/51210617.pdf>, diunduh pada 23 Juli 2015.

¹⁴ *Ibid.*

yang ada seperti sengketa wilayah yang ada di kawasan Asia Pasifik¹⁵. Menurut Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2013, bahwa Indonesia menginginkan adanya keseimbangan yang dinamis (*dynamic equilibrium*) di kawasan Asia Pasifik, sehingga tidak ada kekuasaan yang mendominasi di kawasan tersebut. Keseimbangan yang dinamis tersebut dibangun dengan meningkatkan kerjasama dan membangun pola hubungan kerjasama dan kemitraan sehingga kompetisi dan konfrontasi bisa dihindari¹⁶. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia terus mendorong diwujudkannya gagasan *Indo-Pacific Treaty for Friendship and Cooperation* yang bertujuan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan mengesampingkan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa¹⁷. Gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini pertama kali dikemukakan oleh Marty Natalegawa.

Pada 16 Mei 2013 di Washington D.C., mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, di hadapan konferensi yang diselenggarakan oleh *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) mengemukakan gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation* di kawasan Asia Pasifik. *Indo-Pacific Treaty* ini dianggap sejalan dengan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC)

¹⁵ Ezra Sihite, "Indonesia Tak Mau Ada Kekuatan Dominan di Asia", *BeritaSatu.com*, dalam <http://www.beritasatu.com/asia/132049-indonesia-tak-mau-ada-kekuatan-dominan-di-asia-pasifik.html>, diunduh pada Agustus 2015.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

yang dimiliki oleh ASEAN. Melalui gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini, Natalegawa menekankan bahwa perubahan di bidang ekonomi, keamanan dan politik dalam kawasan Indo-Pasifik tidak akan berakhir. Hal inilah yang menjadi alasan utama dibutuhkan paradigma baru dalam mengelola hubungan bilateral dan multilateral di Asia Pasifik¹⁸.

Melihat adanya pengaruh dan kepentingan nasional dari masing-masing negara besar di kawasan Asia Pasifik, yakni Amerika Serikat, Cina, Jepang dan Rusia, dapat dilihat bahwa saat ini terdapat beberapa permasalahan keamanan yang ada di kawasan seperti permasalahan sengketa wilayah di Laut Cina selatan dan Laut Cina Timur serta peningkatan kekuatan pertahanan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Keberadaan ARF sebagai sebuah forum dialog untuk menyelesaikan permasalahan di bidang politik dan keamanan di Asia Pasifik belum mampu menyelesaikan semua permasalahan tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Acharya dan Tan bahwa berkembangnya isu-isu keamanan memunculkan kebutuhan strategi keamanan yang baru untuk melengkapi yang sudah ada saat ini yang mungkin saja perlu diformulasi ulang sesuai dengan perkembangan lingkungan yang berubah¹⁹. Gagasan dari Marty Natalegawa tentang

¹⁸ Jack Georgieff, "An Indo-Pacific Treaty: An Idea Whose Time Has Come?", *The Diplomat*, dalam <http://thediplomat.com/2013/05/an-indo-pacific-treaty-an-idea-whose-time-has-come>, diunduh pada 11 Mei 2015.

¹⁹ Amitav Acharya dan See Seng Tan, *op.cit.*

pembentukan *Indo-Pacific Treaty* dapat menjadi alternatif dalam memformulasi ulang strategi keamanan kawasan dalam memperjuangkan kerjasama damai yang berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik bahkan lebih luas lagi di kawasan Indo-Pasifik. Akan tetapi, bagaimanakah sebenarnya gagasan Indonesia mengenai *Indo-Pacific Treaty*? Serta bagaimanakah prospek dan masalah yang ada dalam mewujudkan gagasan tersebut?

Landasan Teori

Teori Keamanan

Bagi banyak analis, kata keamanan (*security*) memiliki makna seperti keindahan (*beauty*) karena berkaitan dengan istilah yang subjektif dan elastis dimana maknanya akan berbeda-beda bagi setiap orang²⁰. Oleh karena itu, Keamanan sering dikatakan sebagai sebuah “*essentially contested concept*” yang berarti bahwa istilah tersebut tidak memiliki konsensus yang pasti tentang apa pengertian sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa setiap orang memiliki makna keamanan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya²¹. Kebanyakan para pakar ilmu Hubungan Internasional memiliki konsep bahwa pengertian keamanan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan penghilangan ancaman terhadap nilai-nilai yang dianggap berharga.²²

²⁰ Paul D. Williams, *Security Studies: An Introduction*, (Oxon: Routledge, 2008).

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Saat ini terdapat dua pandangan pendekatan atas *security studies*, yakni pandangan lama yang sempit dan berfokus pada hal militer dan negara yang dikenal sebagai tradisional dan pandangan baru yang lebih luas²³. Pandangan baru tersebut seperti dikemukakan oleh Buzan dalam bukunya yang berjudul *People, States and Fear* yang diterbitkan pada tahun 1983. Buzan berpendapat bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan negara, namun juga terkait dengan semua yang berhubungan dengan manusia dan tidak juga dibatasi hanya berfokus pada urusan kekuatan militer²⁴. Buzan mengembangkan kerangka bahwa dalam hal keamanan yang berhubungan dengan manusia (bukan hanya negara) dipengaruhi oleh faktor-faktor di lima sektor utama (militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang masing-masing memiliki titik fokus dan cara tersendiri dalam menyusun hal-hal yang menjadi prioritas²⁵.

Konsep Arsitektur Keamanan di Kawasan Asia Pasifik

Arsitektur keamanan di Asia Pasifik yang ada saat ini maupun di masa depan, tidak hanya berkembang sebagai hasil dari forum multilateral seperti ARF dan forum-forum lainnya. Bagi beberapa negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya, sistem aliansi merupakan bagian dari arsitektur keamanan di

²³ Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, (Boulder : Lynne Rienner Publishers, 1998).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Paul D. Williams, *op.cit.*

kawasan Asia Pasifik dan sistem tersebut dianggap ideal oleh Amerika Serikat. Sementara itu, forum-forum multilateral yang tidak mengikutsertakan Amerika Serikat didalamnya, merupakan hal yang tidak diinginkan oleh Amerika Serikat²⁶.

Sejalan dengan itu, Ralf Emmers mengemukakan bahwa kerjasama keamanan di Asia pasifik telah dipengaruhi oleh dua jenis pendekatan, yakni aliansi bilateral dan keamanan yang komperhensif dan kooperatif. Keduanya merupakan dua jenis model kerjasama keamanan yang berbeda. Aliansi berfokus secara sempit pada keamanan militer dan secara definisi didasarkan pada pemikiran bahwa keamanan harus ditingkatkan untuk melawan musuh yang berpotensi atau yang sudah menjadi musuh. Pengaturan keamanan secara tradisional dioperasikan dalam sistem anarki dimana masing-masing negara bertanggung jawab atas keamanan mereka masing-masing. Dalam hal ini, keamanan didekati dari segi kompetitif dan menang-kalah.²⁷

Sementara itu, konsep keamanan yang komprehensif dan kooperatif mengadopsi pengertian yang luas dari keamanan dan mendukung pemikiran bahwa keamanan harus ditingkatkan melalui kerjasama dengan pihak lain dan bukannya melawan pihak lain. Meskipun keamanan yang komprehensif dan

²⁶ Bantarto Bandoro, *Indonesia dalam Lingkungan Strategis yang Berubah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

²⁷ Ralf Emmers, "Security Cooperation in the Asia Pacific: Evolution of Concepts and Practices" dalam Amitav Acharya dan See Seng Tan, *Asia-Pacific Security Cooperation*, (New York: M.E. Sharpe, 2004), hlm. 3-18.

kooperatif telah menjadi kunci utama yang mempengaruhi struktur kerjasama multilateral di Asia Pasifik, namun aliansi bilateral sudah mendominasi arsitektur strategis keamanan di Asia Pasifik dan tetap menjadi landasan kerjasama keamanan di wilayah kawasan tersebut walaupun kedepannya bisa terjadi perubahan²⁸.

Menurut Bandoro, setidaknya terdapat tiga pilihan mengenai arsitektur keamanan regional di kawasan Asia Pasifik. Ketiga pilihan tersebut adalah (1) kontinuitas vs perubahan; (2) struktur multilateral yang tumpang tindih vs struktur tunggal; dan (3) Asia Pasifik yang unipolar vs himpunan kekuatan (*concert of power*) vs komunitas. Pilihan tersebut tidak hanya muncul karena faktor kebutuhan untuk merancang arsitektur keamanan yang ideal di kawasan Asia Pasifik, namun juga karena banyak bermunculannya gejala atau isu keamanan di kawasan Asia Pasifik, baik karena pengaruh hubungan antar negara maupun karena faktor internal di dalam negara-negara di kawasan²⁹.

Dalam pilihan pertama, yakni kontinuitas vs perubahan, negara-negara di kawasan dihadapkan pada pilihan menggunakan arsitektur keamanan yang ada saat ini, yang berpusat pada ASEAN dan ARF yang merupakan forum dialog yang membahas permasalahan keamanan atau memilih membentuk satu perangkat lembaga yang baru. Jika tetap memilih menggunakan ARF, maka ASEAN

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bantarto Bandoro, *op.cit.*

akan disoroti terkait kemampuannya dalam menggerakkan ARF menuju tahap diplomasi preventif ataupun tahapan selanjutnya dalam menangani isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik.³⁰

Sementara itu, jika memilih membentuk sebuah lembaga baru mungkin dapat memberikan pemecahan atas kebuntuan yang dihadapi ARF selama ini. Dengan membentuk sebuah lembaga yang baru diharapkan bisa menjadi forum nyata dalam melakukan diplomasi preventif dalam menyelesaikan isu-isu keamanan tanpa terhalangi urusan kedaulatan negara. Yang perlu menjadi perhatian bagi lembaga baru tersebut adalah bagaimana mendapatkan kepercayaan dalam usahanya menyelesaikan permasalahan keamanan di kawasan karena tingkat kepercayaan menjadi permasalahan tersendiri bagi ARF dalam upaya bergerak ke tahap selanjutnya dalam penyelesaian permasalahan keamanan yang ada³¹.

Dalam pilihan kedua, yakni struktur multilateral yang tumpang tindih vs struktur tunggal, kawasan Asia Pasifik dihadapkan pada pilihan menggunakan arsitektur keamanan kawasan yang berkembang dari lembaga-lembaga yang terikat seperti ARF yang berasal dari ASEAN, atau menggunakan struktur baru yang independen dan tidak terikat dengan ASEAN. Yang dimaksud dalam pilihan kedua ini adalah apakah nantinya negara-negara di kawasan Asia Pasifik akan tetap mempertahankan lembaga-

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

lembaga yang ada seperti ASEAN, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *ASEAN Plus Three* (APT), dan yang lainnya. Sehingga arsitektur keamanan kawasan hanya akan fokus pada penyelesaian masalah keamanan tradisional, atau membangun struktur tunggal baru yang berfungsi mengkoordinasikan dan mengimplementasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada saat ini³².

Pilihan ketiga yang telah disebutkan di atas adalah Asia Pasifik yang unipolar vs himpunan kekuatan (*concert of power*) vs komunitas. Asia Pasifik yang unipolar didasarkan pada keyakinan bahwa Amerika Serikat masih memegang peranan penting di kawasan Asia Pasifik dan tetap mempertahankan supremasinya melalui kekuatan militernya. Negara-negara di Asia memiliki peran dalam mempertahankan hegemoni Amerika Serikat di kawasan. Hal ini terlihat dari sikap hati-hati negara-negara Asia Pasifik dengan mencari aliansi strategis dengan Amerika Serikat dalam menyikapi kebangkitan Cina di kawasan. Lebih jauh lagi, Amerika Serikat dipandang sebagai mitra yang handal bagi Asia dalam mengamankan kawasan. Amerika Serikat sendiri terlihat menghindari untuk mendukung arsitektur keamanan kawasan yang bisa mengurangi peran dan pengaruhnya di kawasan³³.

Sementara itu, *concert of power* di kawasan Asia Pasifik dapat dilihat dari gagasan yang pernah dikemukakan oleh Australia melalui pembentukan *Asia-*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Pacific Community(APC). *Concert of power* merupakan versi diperluasnya keamanan kooperatif,yang didalamnya dibuat kesepakatan mengenai prinsip, peraturan dan prosedur untuk mengatur hubungan antar negara. Sehingga bisa meningkatkan kepercayaan dan mengurangi potensi munculnya kesalahan persepsi yang dapat menimbulkan krisis antar negara di kawasan³⁴.

Komunitas keamanan dapat menjadi tujuan jangka panjang di kawasan Asia Pasifik karena akan sangat sulit jika ingin direalisasikan dalam jangka pendek. Komunitas keamanan menjadi sebuah hubungan kerjasama keamanan yang jauh lebih dalam dari kerjasama kooperatif yang ada saat ini di kawasan Asia Pasifik. Dalam komunitas keamanan, kepentingan dan ide-ide nasional berada di bawah sistem supra-nasional dimana setiap negara tidak hanya mempedulikan masalah keamanan negara masing-masing, namun juga keamanan negara-negara lain yang ada dalam satu komunitas keamanan yang sama. Dalam komunitas keamanan terdapat mekanisme yang disepakati untuk menyelesaikan perselisihan, dan penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan dianggap tidak sah dalam komunitas keamanan tersebut³⁵.

Konsep Kerjasama Internasional

Terdapat banyak pandangan mengenai pengertian dari kerjasama internasional,

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

di antaranya adalah yang dikemukakan oleh Kalevi Jaakko Holsti dalam bukunya berjudul *International Politics: A Framework for Analysis*. Holsti mengemukakan beberapa pengertian dari kerjasama internasional, antara lain:³⁶

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi maupun tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Teori Balance of Power

Dalam konteks kerjasama internasional, dikenal juga adanya istilah *balance of power*. Teori *Balance of Power* secara tradisional mengacu pada keadaan di mana tidak ada satu negara mendominasi

³⁶ Kalevi Jaakko Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis (6th ed.)*,(New Jersey:Prentice-Hall, 1992).

atas negara lain. Hal tersebut juga mengacu pada kebijakan mempromosikan keseimbangan kekuasaan dengan asumsi bahwa *unbalanced power* adalah berbahaya. Dalam konsep *Balance of Power* dijelaskan bahwa suatu negara besar harus diimbangi dengan satu negara besar lainnya untuk memberikan kestabilan di dalam suatu kondisi politik dunia. Selain itu, negara-negara yang melakukan perimbangan kekuasaan haruslah negara yang sama besar dan kuat kekuasaannya. Konsep *Balance of Power* ini mencegah adanya hegemoni salah satu negara di dunia terhadap negara lain³⁷.

Sejalan dengan hal tersebut, Hedley Bull mengungkapkan bahwa prinsip *balance of power* sangat berharga karena prinsip tersebut bersifat kondusif bagi tatanan internasional yang dapat menghasilkan semacam tujuan dasar dari arti kehidupan sosial, yakni kelangsungan hidup, jaminan keamanan dan stabilitas untuk kekayaan pribadi. Tujuan tersebut adalah hal yang lumrah baik bagi individu maupun bagi negara. Selanjutnya, *balance of power* sangat berharga untuk negara-negara karena bisa mencegah munculnya hegemoni. Dengan hal ini, Bull mendukung sejumlah pendapat yang menyatakan bahwa negara harus menjadi agen independen yang memilih secara bebas nasib mereka sendiri. Nilai moral dari kebebasan dan saling kemandirian melegitimasi *balance of power*³⁸.

³⁷ Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts*, (London: Routledge, 2002).

³⁸ Hedley Bull, *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (2nd ed.)*, (New York: Columbia University Press, 1995).

Teori Negara Superpower

Negara-negara di dunia ini pada dasarnya tidak sama ataupun serupa satu sama lain. Hal ini diungkapkan oleh John Rennie Shor karena alasan bahwa setiap negara memiliki variasi dalam hal kekuasaan dan pengaruh. Negara-negara *superpower* adalah negara-negara yang memiliki kapasitas global untuk memengaruhi peristiwa atau kejadian. Bagi para negara *superpower*, permukaan dunia diibaratkan seperti papan catur raksasa di mana setiap langkah dan kontra-langkah akan menunjukkan perubahan dalam *Balance of Power*³⁹.

Negara-negara *superpower* memiliki tujuan untuk mempertahankan posisi puncak mereka di dalam tatanan dunia. Selain itu, mereka juga memiliki tujuan untuk menggabungkan sebanyak mungkin wilayah negara-negara lain didalam pengaruh mereka. Mereka memperoleh status sebagai *superpower* melalui pengaruh kekuatan mereka di bidang ekonomi, militer dan politik. Cakupan pengaruh negara *superpower* dapat didefinisikan sebagai wilayah di mana negara *superpower* tersebut dapat menggunakan kekuasaannya secara efektif. Yang membuat negara-negara tersebut menjadi *superpower* adalah cakupan dan tingkat pengaruh atas negara-negara lain. Pengaruh dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan⁴⁰.

³⁹ John Rennie Shor, *An Introduction to Political Geography (2nd ed.)*, (London: Routledge, 1993).

⁴⁰ *Ibid.*

Dilihat dari sejarahnya, negara-negara *superpower* memiliki dua karakteristik, yaitu:

1. negara *superpower* melegitimasi kekuasaannya melalui ideologi;
2. negara *superpower* tidak akan bertahan selamanya (karena pasti akan muncul negara-negara baru yang mampu mengimbangi kekuatan dari negara *superpower* tersebut)⁴¹.

Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Perubahan merupakan suatu hal yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menjadi negara yang memiliki kualitas lebih baik. Perubahan kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa di negara tersebut. Pada kenyataannya, terdapat kecenderungan untuk menyimpulkan bahwa perubahan rezim hampir menjadi satu-satunya cara untuk mencapai pergeseran besar dalam kebijakan luar negeri suatu negara⁴².

Menurut Charles F. Hermann, konsep dari kebijakan luar negeri adalah sebuah program atau rencana yang dirancang untuk mengatasi beberapa masalah atau mengejar beberapa tujuan yang memerlukan tindakan terhadap entitas asing. Program atau rencana tersebut mengkhususkan kondisi-kondisi dan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Charles F. Hermann, "Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy", *International Studies Quarterly*, Vol. 34, No. 1, 1990, hlm. 3-21.

perangkat kenegaraan⁴³.

Dengan definisi tersebut, perubahan kebijakan luar negeri dapat dilihat dalam empat tahapan perubahan, antara lain:⁴⁴

1. *Adjustment Changes*: adalah perubahan yang terjadi pada tingkatan upaya dan/atau jangkauan penerima kebijakan tersebut (misalnya perbaikan pada kelas target). Apa yang dilakukan, bagaimana hal itu dilakukan, dan tujuan hal itu dilakukan tetap tidak berubah.
2. *Program Changes*: adalah perubahan yang dibuat pada metode atau cara di mana tujuan atau masalah ditujukan. Berbeda dengan *Adjustment Changes* yang cenderung kuantitatif, maka *Program Changes* adalah kualitatif dan melibatkan perangkat baru kenegaraan (seperti mewujudkan tujuan melalui negosiasi diplomatik dibandingkan dengan kekuatan militer). Apa yang dilakukan dan bagaimana dilakukan akan diubah, namun tujuan hal itu dilakukan tetap tidak diubah.
3. *Problem/Goal Changes*: adalah perubahan dimana tingkatan masalah atau tujuan awal yang ditujukan dalam kebijakan tersebut digantikan atau dihilangkan. Pada perubahan ini, tujuan dari kebijakan tersebut diganti.
4. *International Orientation Changes*: adalah bentuk paling ekstrim dari

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

perubahan kebijakan luar negeri yang melibatkan pengalihan seluruh orientasi pelaku terhadap persoalan dunia. Perubahan orientasi ini melibatkan pergeseran dasar dalam peran internasional dan kegiatan pelaku. Tidak hanya terjadi pada satu kebijakan, namun perubahan tersebut terjadi secara serempak.

Long Cycle Theory

Long Cycle Theory yang dikemukakan oleh George Modelski merupakan sebuah teori tentang pola keteraturan dari operasional di politik global yang khususnya berfokus pada kebangkitan dan kejatuhan kekuatan-kekuatan di dunia. Didalam teori ini terdapat sebuah konsepsi yang digambarkan melalui sebuah *long cycle* yang terdiri atas urutan empat fase yang disebut sebagai “*learning*” *long cycle*. Keempat fase dalam “*learning*” *long cycle* tersebut yaitu: ⁴⁵

1. *Agenda-setting*;
2. *Coalition-building*;
3. *Macrodecision*; dan
4. *Execution*.

Penjelasan dari keempat fase tersebut adalah sebagai berikut. Fase pertama, *Agenda-setting*, menunjukkan munculnya konseptualisasi baru dari permasalahan global. Fase kedua, *Coalition-building*, mengacu pada keberpihakan yang mulai terbangun terkait adanya agenda baru.

⁴⁵ George Modelski, “Long Cycles in Global Politics”, *International Relations*, Vol. 2, 2009, hlm. 230-252.

Fase ketiga, *Macrodecision*, merupakan fase pengambilan keputusan secara sistemik yang memilih kepemimpinan baru dan agenda koalisi pemenangnya. Fase keempat, *Execution*, merupakan fase tempat hasil dari fase ketiga diimplementasikan⁴⁶.

PEMBAHASAN

Gagasan Pembentukan *Indo-Pacific Treaty for Friendship and Cooperation*

Dilihat dari sisi geografi, istilah Indo-Pasifik dalam gagasan *Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation* merupakan kawasan yang terbentang dari dua Samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kawasan ini juga penting karena dilewati beberapa jalur pelayaran paling penting di dunia yakni sebagai jalur utama pergerakan perdagangan dunia yang menyambungkan dua Samudra tersebut. Dalam bidang politik dan ekonomi, istilah Indo-Pasifik mengacu pada kawasan dimana terdapat beberapa negara dengan perekonomian paling dinamis di dunia yang berperan baik dalam mengubah perekonomian dunia maupun dalam bidang politik. Saat ini kawasan Indo-Pasifik adalah sebuah kekuatan ekonomi yang berperan sebagai mesin dalam pertumbuhan ekonomi global dan mencakup sekitar dua per tiga dari perdagangan global. Penggunaan istilah Indo-Pasifik akan bisa mewujudkan interkoneksi antara kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik di masa depan⁴⁷. Untuk selanjutnya istilah Asia

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Marty Natalegawa, “An Indonesia Perspective

Pasifik pada tulisan ini disebut sebagai Indo-Pasifik.

Kawasan Indo-Pasifik akan menghadapi tantangan-tantangan yang beragam atau *multi-faceted challenges*. Tantangan pertama adalah *trust-deficit* atau defisit kepercayaan. Tantangan yang dihadapi saat ini sangat mungkin untuk berkembang menjadi ancaman besar bahkan sampai menjadi konflik terbuka karena meningkatnya faktor ketidakpercayaan yang dapat meningkatkan tensi permasalahan tersebut. Cara penyelesaiannya adalah dengan membangun kepercayaan dan keyakinan, mengutamakan rasa saling menahan diri, membangun komunikasi⁴⁸. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara negara-negara sekawasan diperlukan untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh defisit kepercayaan antarnegara⁴⁹.

Tantangan kedua adalah *unresolved territorial claims* atau sengketa wilayah yang belum terselesaikan. Terkait sengketa wilayah yang belum terselesaikan ini dibutuhkan komitmen dari pihak-pihak yang bersengketa wilayah untuk menghormati dan menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang telah disepakati agar menghindari kesalahan perhitungan atau munculnya krisis yang tidak diinginkan⁵⁰. Contoh dari masalah

on The Indo-Pacific”, dalam http://csis.org/files/attachments/130516_MartyNatalegawa_Speech.pdf, diunduh pada 11 Mei 2015.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Jack Georgieff, *op.cit.*

⁵⁰ Marty Natalegawa, *op.cit.*

sengketa wilayah yang sangat krusial saat ini di kawasan Indo-Pasifik adalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur⁵¹.

Tantangan ketiga adalah *managing the impact of change* atau mengelola perubahan. Perubahan dan transformasi terjadi di seluruh kawasan Indo-Pasifik dalam bidang politik dan ekonomi yang memiliki dampak tidak hanya bagi internal negara tersebut tetapi juga negara-negara di sekitarnya. Sejalan dengan munculnya perubahan, maka muncul juga tantangan baru yang dapat dihadapi dengan cara menjalin hubungan kemitraan atau dengan cara berkompetisi⁵². Terkait tantangan ketiga ini, dikarenakan perubahan dalam bidang ekonomi, keamanan dan politik di kawasan Indo-Pasifik tidak akan berakhir, maka hal ini yang menjadi inti dibutuhkan sebuah perspektif baru dalam mengelola keamanan di kawasan Indo-Pasifik⁵³.

Kawasan Indo-Pasifik memerlukan sebuah perspektif baru yang mempromosikan sebuah *dynamic equilibrium* atau keseimbangan dinamis. Kata “dinamis” mengacu pada pengakuan bahwa perubahan adalah melekat dan konstan terdapat di dalam kawasan.

⁵¹ Ignatius Randy, “Relevansi Konsep *Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation* dengan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Indo-Pasifik: Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI, dalam [http://www.kemlu.go.id/pusdiklat/Documents/01%20Politik/Relevansi%20Konsep%20Indo-Pasific%20Treaty%20of%20Friendship%20and%20Cooperation%20\(Politik\).pdf](http://www.kemlu.go.id/pusdiklat/Documents/01%20Politik/Relevansi%20Konsep%20Indo-Pasific%20Treaty%20of%20Friendship%20and%20Cooperation%20(Politik).pdf), diunduh pada 26 Agustus 2015.

⁵² Marty Natalegawa, *op.cit.*

⁵³ Jack Georgieff, *op.cit.*

Sementara itu, kata “keseimbangan” berarti bahwa perubahan yang konstan tersebut tidak berimplikasi secara anarkis dalam hubungan antarnegara, baik karena pengaruh yang kuat dari satu negara, maupun karena kekacauan atau ketidakpastian yang dihubungkan dengan kawasan yang multipolar⁵⁴.

Perdamaian dan stabilitas didalam kawasan seharusnya dihasilkan melalui promosi keamanan, kesejahteraan dan stabilitas bersama. Keamanan hanya bisa dinikmati oleh banyak negara jika keamanan dilihat sebagai sebuah kebersamaan dan bukan sebagai sesuatu yang diperoleh dengan mengorbankan yang lain. Sebuah keseimbangan dinamis dihasilkan melalui promosi rasa tanggung jawab bersama dalam usaha untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan⁵⁵. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa semangat *dynamic equilibrium* menunjukkan pola hubungan yang dilandasi oleh semangat kerja sama dan kemitraan sehingga kompetisi ataupun konfrontasi harus dihindari. Negara-negara di Asia Pasifik harus yakin bahwa kemajuan sebuah negara merupakan peluang bagi peningkatan kerja sama⁵⁶.

Untuk menghasilkan keseimbangan dinamis di kawasan Indo-Pasifik, diusulkan pembentukan *Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation*, yang merupakan komitmen dari negara-negara di kawasan untuk membangun

kepercayaan diri, menyelesaikan sengketa dengan cara damai, dan mempromosikan konsep keamanan yang mencakup semua dimana keamanan adalah milik bersama⁵⁷. *Indo-Pacific Treaty* bertujuan untuk meningkatkan saling percaya sekaligus mengesampingkan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa antara negara-negara di dalam kawasan⁵⁸.

Makna Gagasan Indonesia Mengenai *Indo-Pacific Treaty*

Gagasan Marty Natalegawa mengenai *Indo-Pacific Treaty* mendapat dukungan karena maknanya dinilai sesuai dengan gagasan awal pembentukannya. Di antaranya dikatakan bahwa *Indo-Pacific Treaty* dikonsepsikan untuk menjadi mekanisme pembangunan norma dan prinsip bagi sebuah kawasan yang senantiasa berubah dan diharapkan dengan *Indo-Pacific Treaty* ini akan bisa menciptakan keamanan bersama yang dihasilkan dengan tidak mengorbankan pihak-pihak lain yang ada di dalam kawasan tersebut⁵⁹. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengartikan *Indo-Pacific Treaty* sebagai traktat persahabatan dan kerjasama dengan tujuan meningkatkan rasa saling percaya dan penggunaan cara damai dalam menyelesaikan sengketa⁶⁰.

Dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa makna

⁵⁴ Marty Natalegawa, *op.cit.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Ezra Sihite, *op.cit.*

⁵⁷ Marty Natalegawa, *op.cit.*

⁵⁸ Ezra Sihite, *op.cit.*

⁵⁹ Ignatius Randy, *op.cit.*

⁶⁰ Ezra Sihite, *op.cit.*

gagasan *Indo-Pacific Treaty* merupakan sebuah komitmen dari negara-negara di kawasan yang senantiasa berubah dan dikonsepsikan untuk menjadi mekanisme pembangunan norma dan prinsip. Norma dan prinsip tersebut digunakan dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan diri, untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan untuk mempromosikan konsep keamanan yang mencakup semua dimana keamanan adalah milik bersama serta tidak mengorbankan pihak-pihak lain yang ada di dalam kawasan.

Berdasarkan analisis, makna gagasan awal mengenai *Indo-Pacific Treaty* yang dikemukakan oleh Marty Natalegawa sangat benar. Hal tersebut didukung oleh teori keamanan yang dikemukakan Buzan bahwa urusan keamanan tidak hanya berfokus pada urusan kekuatan militer, ada sektor lain yang menjadi fokus prioritas dalam bidang keamanan, yakni sektor politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Adapun persamaan yang dapat diambil diantaranya adalah pada makna gagasan dikemukakan mengenai konsep damai dan dialog dalam menyelesaikan sengketa dan untuk mempromosikan konsep keamanan yang mencakup semua dimana hal tersebut sesuai dengan teori keamanan dari Buzan yang menyatakan masalah keamanan tidak hanya mengenai urusan kekuatan militer saja.

Dari hasil analisis tersebut, dapat dikemukakan bahwa gagasan awal mengenai makna *Indo-Pacific Treaty*

sangat baik, karena didukung dan sesuai dengan teori keamanan. Oleh karena itu, gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty* diharapkan dapat direalisasikan, disepakati dan diimplementasikan oleh negara-negara di kawasan Indo-Pasifik sebagai solusi untuk menyelesaikan atau menghindari konflik-konflik keamanan di kawasan tersebut.

Tujuan dan Tiga Area Utama dari Gagasan *Indo-Pacific Treaty*

Lebih lanjut, tujuan gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty* yang dikemukakan Marty Natalegawa didukung karena sesuai dengan gagasan awal pembentukannya. Ignatius Randy mengemukakan bahwa *Indo-Pacific Treaty* bertujuan untuk menciptakan kawasan yang dapat memberikan kontribusi dalam perdamaian dan keamanan, serta meningkatkan rasa saling percaya dan penggunaan cara damai dalam menyelesaikan sengketa di kawasan⁶¹. Sejalan dengan itu, Natalie Sambhi mengemukakan bahwa tujuan dari gagasan ini adalah untuk mendorong gagasan mengenai keamanan bersama dan mempromosikan rasa percaya dan penyelesaian sengketa dengan cara damai⁶². Dengan memiliki traktat tersebut, negara-negara di kawasan akan mulai berpikir tentang diri mereka sebagai anggota komunitas yang bertanggung jawab untuk keamanan

⁶¹ Ignatius Randy, *op.cit.*

⁶² Natalie Sambhi, "Do We Need An Indo-Pacific Treaty?", *The Strategist*, dalam <http://www.aspistrategist.org.au/do-we-need-an-indo-pacific-treaty/>, diunduh pada 18 September 2016.

bersama⁶³. Sementara itu, Rory Medcalf menyampaikan pendapatnya terkait tujuan dari gagasan *Indo-Pacific Treaty* yakni menjadi alternatif dari kompetisi kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik⁶⁴.

Indo-Pacific Treaty yang diusulkan oleh Marty Natalegawa ini merupakan traktat yang akan mengadopsi dan mengaplikasikan konstruksi dari norma dan aturan yang telah ada yang digunakan ASEAN, yaitu TAC. Namun dapat dikatakan bahwa *Indo-Pacific Treaty* akan menjadi lebih ambisius dibandingkan dengan TAC. Hal tersebut dikarenakan *Indo-Pacific Treaty* bertujuan untuk dapat mengantisipasi konflik di kawasan Indo-Pasifik serta menawarkan mekanisme *pre-emptive* untuk pencegahan dan resolusi konflik⁶⁵.

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan gagasan *Indo-Pacific Treaty* yakni berkontribusi dalam perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan rasa percaya dan menyelesaikan sengketa dengan cara damai; menawarkan mekanisme *pre-emptive* untuk pencegahan dan resolusi konflik; menjadi alternatif dari kompetisi kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik; serta bertujuan agar negara-negara di kawasan akan mulai berpikir tentang diri mereka sebagai anggota komunitas yang

⁶³ Natalie Sambhi, komunikasi personal, 28 September 2016.

⁶⁴ Rory Medcalf, komunikasi personal, 27 September 2016.

⁶⁵ Joseph Chinyong Liow, "What to make of Indonesia's Indo-Pacific Treaty", *The Straits Times*, dalam <http://www.straitstimes.com/news/opinion/more-opinion-stories/story/what-make-indonesias-indo-pacific-treaty-20141016>, diunduh pada 11 Mei 2015.

bertanggung jawab untuk keamanan bersama.

Selain itu, tiga area utama yang menjadi dasar permasalahan di kawasan Indo-Pasifik dan teridentifikasi akan berpotensi mengganggu keamanan kawasan seperti yang disebutkan Marty Natalegawa pada awal gagasan ini dikemukakan juga mendapatkan dukungan. Tiga area utama tersebut adalah: (1) defisit kepercayaan; (2) sengketa wilayah yang belum terselesaikan dan; (3) pengelolaan perubahan di kawasan. Randy mengungkapkan pendapatnya mengenai tiga area utama yang ingin diantisipasi oleh *Indo-Pacific Treaty* sebagai berikut:

"... Menlu RI mengemukakan konsep tersebut untuk mengantisipasi tiga buah tantangan yang muncul di kawasan Indo-Pasifik yaitu *territorial disputes* yang berkepanjangan, perubahan geopolitik dan meningkatnya rasa saling tidak percaya diantara negara-negara besar di kawasan..."⁶⁶.

Sejalan dengan hal tersebut, Georgieff mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

"... Natalegawa outlined three key areas that could be addressed in the Indo-Pacific under his notion of a regional friendship treaty: the trust deficit; unresolved territory disputes; and managing change in the region..."⁶⁷

Sementara itu, Liow mengungkapkan pendapatnya mengenai tiga area utama dalam *Indo-Pacific Treaty* sebagai berikut:

"... The backdrop for this proposal

⁶⁶ Ignatius Randy, *op.cit.*

⁶⁷ Jack Georgieff, *op.cit.*

was what Dr Natalegawa identified as three key areas that might potentially destabilise the region: A “trust deficit” between some states in the region, the existence of unresolved territorial claims and a rapid transformation of regional states that affects the relationships between them. . . “⁶⁸

Berdasarkan analisis, tujuan gagasan dan tiga area utama dalam *Indo-Pacific Treaty* tersebut sesuai dengan konsep keamanan yang komprehensif dan kooperatif yang dikemukakan oleh Emmers. Dalam konsep keamanan yang komprehensif dan kooperatif, keamanan dilihat dalam pengertian yang luas dan harus ditingkatkan melalui kerjasama dengan pihak lain dan bukannya dengan melawan pihak lain. Konsep tersebut sama dengan tiga area utama dan tujuan gagasan, yakni permasalahan defisit kepercayaan, sengketa wilayah dan perubahan di kawasan yang melalui *Indo-Pacific Treaty*. Hal ini coba diatasi dan dicegah dengan mempromosikan rasa percaya dan penyelesaian dengan cara damai, serta semua pihak didalam kawasan bertanggung jawab untuk keamanan bersama.

Dari hasil analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam tujuan gagasan dan tiga area utama dalam *Indo-Pacific Treaty* sangatlah baik. Hal ini karena sesuai dengan konsep keamanan yang komprehensif dan kooperatif, sehingga dapat meningkatkan kerjasama keamanan dengan cara damai dan menghindari penggunaan kekerasan atau kekuatan militer untuk menyelesaikan

⁶⁸ Joseph Chinyong Liow, *op.cit.*

atau mencegah masalah didalam kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gagasan *Indo-Pacific Treaty* dapat menjadi alternatif atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan keamanan di kawasan Indo Pasifik.

Prospek dalam Mewujudkan Gagasan Indonesia Mengenai *Indo-Pacific Treaty*

Prospek untuk mewujudkan gagasan Indonesia mengenai *Indo-Pacific Treaty* untuk saat ini sangat kecil. Vignesh Ram mengemukakan bahwa untuk saat ini *Indo-Pacific Treaty* tidak memungkinkan ataupun dapat dilaksanakan.⁶⁹ Pendapat lainnya melihat bahwa hanya ada sedikit indikasi bahwa *Indo-Pacific Treaty* ini bisa diwujudkan. Bahkan jika traktat tersebut terwujud, akan sulit untuk melihat bagaimana dan mengapa *Indo-Pacific Treaty* akan menjadi *game-changer*, karena sudah banyak lembaga dan mekanisme yang ada saat ini telah memperjuangkan untuk memperbaiki ketegangan di antara negara-negara di kawasan⁷⁰.

Keberhasilan mewujudkan gagasan *Indo-Pacific Treaty* sangat tergantung pada siapa yang memperjuangkan ide tersebut. Saat ini, terdapat kesan bahwa tidak banyak dorongan di Indonesia terkait isu ini. Hal ini juga tergantung pada apakah negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik menyetujui ide

⁶⁹ Vignesh Ram, “The Proposal for an Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation: A Critical Reassessment”, *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 22-31.

⁷⁰ Joseph Chinyong Liow, *op.cit.*

tersebut⁷¹. Sementara itu, dikatakan juga bahwa *Indo-Pacific Treaty* ini adalah sebuah kesempatan bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk menjadi bagian dalam membentuk norma dan institusi di kawasan. Institusi internasional lainnya yang dibentuk setelah Perang Dunia ke-2, seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah dikritik karena sudah menjauh dari kekuatan yang dinamis saat ini⁷².

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, gagasan *Indo-Pacific Treaty* belum dapat dilaksanakan untuk saat ini dikarenakan hanya ada sedikit indikasi untuk mewujudkannya dan terdapat kesan bahwa tidak banyak dorongan di Indonesia untuk mewujudkan gagasan tersebut. Walaupun demikian, sebenarnya gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty* ini adalah kesempatan baik bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk menjadi bagian dalam membentuk norma dan institusi untuk keamanan di kawasan mereka.

Berdasarkan analisis, dapat dikatakan bahwa gagasan *Indo-Pacific Treaty* seharusnya dapat diwujudkan karena gagasan ini dapat mewartakan kepentingan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik akan keamanan bersama di dalam kawasan. Hal tersebut didasarkan atas konsep kerjasama internasional yang dikemukakan Holsti dimana dalam kerjasama internasional yang sudah umum di era globalisasi saat ini, terdapat

⁷¹ Rory Medcalf, komunikasi personal, 27 September 2016.

⁷² Natalie Sambhi, komunikasi personal, 28 September 2016.

pertemuan kepentingan, nilai atau tujuan sehingga menghasilkan sesuatu yang dipromosikan dan dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini bahwa dalam kawasan Indo-Pasifik terdapat kesamaan kepentingan dan tujuan untuk menciptakan keamanan bagi semua dan dengan mempromosikan peningkatan rasa percaya dan cara damai dalam mengatasi masalah yang muncul. Selain itu, gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini diharapkan dapat menghasilkan keseimbangan dinamis di kawasan Indo-Pasifik sesuai dengan teori *Balance of Power* yang merupakan keadaan dimana tidak ada satu negara yang mendominasi atas negara lain, sehingga dapat mencegah munculnya hegemoni di kawasan Indo-Pasifik. Dari hasil analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa gagasan *Indo-Pacific Treaty*, walaupun masih sulit diwujudkan untuk saat ini, merupakan jawaban atas komitmen yang dibutuhkan dalam kerjasama keamanan dan menjadi *balance of power* di kawasan Indo-Pasifik.

Masalah dalam Mewujudkan Gagasan Indonesia Mengenai *Indo-Pacific Treaty*

Berdasarkan analisis, terdapat tiga masalah dalam mewujudkan gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty*. Pertama, tidak adanya dukungan dari negara-negara besar atas gagasan *Indo-Pacific Treaty* menjadi salah satu masalah dalam mewujudkan gagasan

ini. Ram mengutip pernyataan dari Bandoro yang berpendapat bahwa tidak akan ada jaminan bahwa negara-negara besar akan menyetujui seperti yang diharapkan oleh Indonesia. Indonesia juga tidak mempunyai kemampuan untuk mendikte arah strategis negara-negara besar tersebut, sehingga kesuksesan gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini masih bisa diperdebatkan.⁷³

Sejalan dengan itu, dikatakan oleh Medcalf bahwa permasalahan dalam mewujudkan gagasan *Indo-Pacific Treaty* secara tidak langsung memang terletak pada persetujuan negara-negara besar atas gagasan ini. Masalah ini juga terjadi pada TAC, yakni dimana negara-negara besar menyatakan menghormati institusi dan perjanjian yang ada, namun pada akhirnya mereka masih mencoba untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui paksaan dan pengaruh. Contohnya TAC tidak dapat menghentikan Cina dalam menggunakan paksaan dan ancaman kekuatan yang tersirat untuk mengubah *status quo* di Laut Cina Selatan⁷⁴.

Lebih lanjut lagi, dapat dikatakan bahwa tanpa dukungan dari negara-negara kuat di dalam *Indo-Pacific Treaty*, maka norma-norma yang dalam hal ini berupa harapan agar negara-negara tidak akan menggunakan kekuatan atau paksaan, tidak akan menjadi pencegah yang dibutuhkan. Banyak negara akan terus bergantung pada mitra aliansi tradisional mereka untuk perlindungan

⁷³ Vignesh Ram, *op.cit*

⁷⁴ Rory Medcalf, komunikasi personal, 27 September 2016.

atau untuk memberikan keseimbangan kepada negara agresif lainnya⁷⁵.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada jaminan bahwa negara-negara besar akan menyetujui gagasan ini dan Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk mendikte arah strategis negara-negara besar tersebut. Tanpa adanya dukungan tersebut, maka norma dan aturan yang akan dibuat dalam gagasan ini tidak akan berhasil menjadi alat untuk mencegah penggunaan kekuatan atau paksaan dalam penyelesaian masalah keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Tidak adanya dukungan dari negara-negara besar tersebut sesuai dengan teori negara *superpower* yang dikemukakan Shor, mengenai kapasitas global dari negara-negara *superpower* dalam mempengaruhi sesuatu, baik kejadian atau peristiwa, baik di bidang ekonomi, militer maupun politik, serta akan tetap berusaha mempertahankan posisi dan pengaruh mereka tersebut untuk mendapatkan hasil yang sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik akan berusaha mengamankan pengaruh mereka atas negara lain di kawasan dengan tidak mendukung gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty* ini.

Permasalahan kedua yakni tidak adanya *blueprints* yang menggambarkan dengan jelas bagaimana cara untuk mewujudkan gagasan *Indo-Pacific Treaty*

⁷⁵ Natalie Sambhi, *op.cit*.

ini. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Liow bahwa tujuan mulia dari *Indo-Pacific Treaty* yang diusulkan oleh Indonesia ini tidak disertai dengan *blueprints* yang menggambarkan dengan jelas bagaimana cara untuk mewujudkannya.⁷⁶

Terkait masalah belum adanya *blueprints* tersebut, hal itu dikarenakan tidak ada kesempatan untuk mengembangkan ide ini lebih jauh lagi dan terjadi sebagian besar karena adanya perubahan pemerintahan dimana Marty Natalegawa sebagai pencetus ide tidak lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia⁷⁷. Sementara itu, TAC yang dimiliki ASEAN dinilai akan menjadi semacam dasar *blueprint* bagi *Indo-Pacific Treaty*, namun pada saat gagasan ini dikemukakan, Natalegawa dinilai tidak memiliki ide yang kuat⁷⁸.

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak adanya *blueprint* menjadi masalah tersendiri dalam mewujudkan gagasan ini. Terlebih lagi dengan tidak adanya *blueprint* tersebut, Indonesia tidak memiliki dasar pegangan untuk meyakinkan negara-negara besar untuk memberikan dukungan dalam mewujudkan gagasan dan tujuan dari *Indo-Pacific Treaty* ini.

Permasalahan ketiga yang menjadi masalah dalam mewujudkan gagasan *Indo-Pacific Treaty*, yakni terkait dengan kelanjutan gagasan *Indo-Pacific Treaty* setelah pergantian pemerintahan di

⁷⁶ Joseph Chinyong Liow, *op.cit.*

⁷⁷ Rory Medcalf, komunikasi personal, 27 September 2016.

⁷⁸ Natalie Sambhi, komunikasi personal, 28 September 2016.

Indonesia dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo. Kecil kemungkinan bagi Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty*. Hal ini terkait dengan banyaknya permasalahan dalam negeri yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya dan pihak oposisi yang mendominasi parlemen yang harus dihadapi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, sepertinya pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak akan mungkin memiliki kekuatan untuk melakukan ekspansi pada tingkat diplomasi internasional jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang berusaha terlibat di dalamnya⁷⁹.

Pendapat lain mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo terkesan tidak memiliki ketertarikan dalam mengupayakan inisiatif diplomatik di kawasan seperti *Indo-Pacific Treaty* ini. Untuk dapat memanfaatkan gagasan *Indo-Pacific Treaty* dalam inisiatif praktis, sepertinya dibutuhkan semacam stimulus dari luar untuk mendorong Indonesia menjadi lebih aktif terkait gagasan ini, seperti munculnya provokasi Cina di Laut Cina Selatan⁸⁰.

Sejalan dengan hal tersebut, dikatakan juga bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai jauh lebih tertarik kepada kebijakan luar negeri yang pragmatis dibandingkan dengan pendekatan melalui norma yang dilakukan mantan Presiden Yudhoyono dan mantan

⁷⁹ Joseph Chinyong Liow, *op.cit.*

⁸⁰ Rory Medcalf, komunikasi personal, 27 September 2016.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Oleh karena itu, prospek mewujudkan kembali *Indo-Pacific Treaty* di era Presiden Joko Widodo dinilai kecil⁸¹.

Dengan pergantian pemerintahan dari mantan Presiden Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo, terjadi perubahan kebijakan luar negeri. Hal tersebut didukung oleh teori dari Hermann mengenai perubahan kebijakan luar negeri suatu negara yang sangat dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa di negara tersebut. Dengan perubahan kebijakan luar negeri tersebut, peneliti melihat bahwa terjadi perubahan pada tahapan *Problem/Goal Changes*. Dalam tahapan perubahan ini, terjadi perubahan dalam tahapan tujuan kebijakan luar negeri Indonesia, dari kebijakan diplomasi internasional dengan prinsip *thousand friends, zero enemy* menjadi kebijakan yang mendukung poros maritim.

Strategi dalam Mewujudkan Gagasan *Indo-Pacific Treaty*

Menurut beberapa ahli, dibutuhkan strategi yang tepat untuk mewujudkan gagasan *Indo-Pacific Treaty*. Dengan mempertimbangkan kondisi di kawasan pada saat ini, Ram menyebutkan strategi yang dapat dilakukan sebagai langkah awal jika ingin mewujudkan gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini. Pertama adalah membangun kepercayaan dan keyakinan di antara negara-negara besar di kawasan. Hal ini menjadi syarat yang sangat penting agar bisa berhasil mewujudkan

⁸¹ Natalie Sambhi, komunikasi personal, 28 September 2016.

apapun. Langkah selanjutnya adalah melembagakan arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Langkah ini merupakan tugas yang menantang dan membutuhkan proses terkait dengan konflik kepentingan dari negara-negara besar di kawasan. Lebih lanjut, ditambahkan bahwa selain menciptakan konsensus di antara negara-negara besar, juga perlu untuk menciptakan pemahaman bersama di antara negara-negara menengah dan berkembang seperti Indonesia, India dan Australia. Hal tersebut menjadi vital dan penting mengingat negara-negara tersebut memiliki lokasi strategis⁸².

Dari pendapat Ram tersebut, dapat dikatakan bahwa strategi yang diusulkannya terdiri atas tiga langkah sebagai berikut: (1) membangun kepercayaan dan keyakinan di antara negara-negara besar di kawasan; (2) menciptakan pemahaman bersama di antara negara-negara menengah dan berkembang yang memiliki lokasi strategis di dalam kawasan Indo-Pasifik; (3) melembagakan arsitektur kawasan Indo-Pasifik⁸³.

Langkah-langkah dalam strategi tersebut sesuai dengan fase-fase yang ada dalam *Long Cycle Theory* dari Modelski. Fase pertama berupa *Agenda-setting* terlihat dari belum terselesaikannya masalah-masalah keamanan di kawasan Indo-Pasifik secara menyeluruh. Kemudian dari hal tersebut dikemukakan gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty* ini dengan agenda

⁸² Vignesh Ram, *op.cit.*

⁸³ Vignesh Ram, *op.cit.*

menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan melalui upaya mempromosikan rasa saling percaya dan penggunaan cara damai dalam penyelesaian masalah keamanan kawasan. Fase kedua berupa *Coalition-building* terlihat dari langkah membangun kepercayaan dan keyakinan dari negara-negara besar dan juga negara-negara menengah dan berkembang. Dengan langkah ini diharapkan adanya kesepahaman dan keberpihakan untuk mewujudkan gagasan tersebut. Fase ketiga berupa *Macrodecision* terlihat dari langkah terakhir yang dapat dihasilkan dalam pengambilan keputusan berupa melembagakan arsitektur kawasan Indo-Pasifik dan dengan langkah tersebut gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini akan lebih mudah diwujudkan. Fase keempat berupa *Execution* baru akan terlihat setelah gagasan tersebut disetujui dan diterapkan di kawasan Indo-Pasifik.

Sampai saat ini, dengan melihat prospek dan masalah dalam mewujudkan gagasan *Indo-Pacific Treaty*, terlihat bahwa gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini baru dalam tahapan *agenda-setting* yakni berupa indentifikasi permasalahan keamanan kawasan dan pencetusan gagasan tersebut. Sehingga langkah-langkah dalam strategi yang diusulkan tersebut belum memasuki fase *coalition-building*, *macrodecision*, apa lagi fase *execution*. Akan tetapi, sekiranya gagasan *Indo-Pacific Treaty* ingin diwujudkan di masa depan, maka langkah-langkah yang sesuai dengan fase-fase yang ada dalam *Long Cycle Theory* dapat dijadikan strategi untuk mewujudkan gagasan ini. Oleh karena itu,

dapat dikatakan bahwa gagasan tersebut dapat terwujud apabila strategi dan langkah-langkah dalam mewujudkannya dijalankan dengan baik, sehingga gagasan tersebut dapat disepakati dan diterima oleh negara-negara di kawasan Indo-Pasifik di masa depan.

Gagasan *Indo-Pacific Treaty* Terkait Konsep Arsitektur Keamanan Kawasan

Pada bagian akhir pembahasan ini, akan dijabarkan analisis terkait gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty* dikaitkan dengan pilihan konsep mengenai arsitektur keamanan di kawasan Asia Pasifik, atau dalam studi ini adalah kawasan Indo-Pasifik. Pertama, gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini jika nantinya diwujudkan dan disepakati oleh negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, akan menjadi pilihan arsitektur keamanan “perubahan”. Dalam pilihan tersebut, *Indo-Pacific Treaty* akan membentuk mekanisme keamanan yang baru dan terpisah dari mekanisme yang ada di kawasan selama ini, seperti ARF. Mekanisme ini akan berbeda dengan mekanisme yang telah ada sebelumnya, karena *Indo-Pacific Treaty* menciptakan norma dan aturannya sendiri dan diharapkan dapat menjadi pemecah kebuntuan yang dihadapi mekanisme-mekanisme yang ada dalam menghadapi ataupun mengantisipasi isu-isu keamanan di kawasan.

Selanjutnya, apabila nanti diwujudkan maka gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini akan menjadi pilihan arsitektur keamanan “struktur tunggal”. Dalam

pilihan tersebut, *Indo-Pacific Treaty* akan menggunakan struktur dan mekanisme baru yang berfungsi mengkoordinasikan dan mengimplementasikan mekanisme yang ada selama ini seperti ASEAN, APEC, *ASEAN Plus Three*, sehingga konsep keamanan yang menyeluruh termasuk di sektor-sektor selain militer, seperti politik, ekonomi, sosial dan lingkungan dapat tercapai melalui *Indo-Pacific Treaty* ini.

Pada akhirnya, apabila nanti diwujudkan maka gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini akan menjadi pilihan arsitektur keamanan “komunitas keamanan”. Dalam pilihan tersebut, *Indo-Pacific Treaty* akan dapat mewujudkan komunitas keamanan yang dapat direalisasikan dalam jangka panjang. Hal tersebut didasarkan bahwa *Indo-Pacific Treaty* menginginkan keamanan kawasan menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara yang ada di kawasan Indo-Pasifik dan akan terdapat mekanisme damai yang disepakati untuk menyelesaikan perselisihan tanpa menggunakan kekuatan. Konsep tersebut sesuai dengan apa yang digambarkan sebagai komunitas keamanan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mewujudkan gagasan *Indo-Pacific Treaty* akan dapat menghasilkan sebuah arsitektur atau mekanisme keamanan kawasan yang baru dan menguntungkan semua negara di kawasan, karena keamanan akan menjadi tanggung jawab bersama dan tidak akan ada pihak yang dirugikan. Hal ini karena penyelesaian sengketa atau masalah akan diselesaikan secara damai sesuai norma dan aturan dan tanpa pengerahan kekuatan.

Kesimpulan

Gagasan Indonesia Mengenai Pembentukan *Indo-Pacific Treaty*

Gagasan mengenai *Indo-Pacific Treaty* memiliki makna sebagai sebuah komitmen dari negara-negara di kawasan Indo-Pasifik yang senantiasa berubah. Gagasan ini dikonsepsikan untuk menjadi mekanisme pembangunan norma dan prinsip dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan diri, menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan mempromosikan konsep keamanan. Konsep keamanan yang diinginkan adalah keamanan yang merupakan milik bersama dan tidak mengorbankan pihak-pihak lain yang ada didalam kawasan. Konsep damai dan dialog dalam menyelesaikan sengketa dan mempromosikan konsep keamanan yang mencakup semua, sesuai teori keamanan dari Buzan yang menyatakan masalah keamanan tidak hanya mengenai kekuatan militer, namun ada sektor lain yang menjadi fokus prioritas, yakni politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa gagasan awal mengenai makna *Indo-Pacific Treaty* sangatlah baik karena menyediakan solusi untuk menyelesaikan atau menghindari konflik-konflik di bidang keamanan di dalam kawasan tersebut.

Selanjutnya, tujuan gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty* juga sesuai dengan gagasan awal pembentukannya, yakni berkontribusi dalam perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan rasa percaya dan penyelesaian sengketa dengan cara

damai; menawarkan mekanisme *pre-emptive* untuk pencegahan dan resolusi konflik; menjadi alternatif dari kompetisi kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik; serta bertujuan agar negara-negara di kawasan akan mulai berpikir tentang diri mereka sebagai anggota komunitas yang bertanggung jawab untuk keamanan bersama. Terdapat tiga area utama yang menjadi dasar permasalahan di kawasan Indo-Pasifik dan teridentifikasi akan berpotensi mengganggu keamanan kawasan seperti yang disebutkan pada awal gagasan ini dikemukakan oleh Marty Natalegawa. Tiga area utama tersebut adalah: (1) defisit kepercayaan; (2) sengketa wilayah yang belum terselesaikan; dan (3) pengelolaan perubahan di kawasan. Tujuan gagasan dan tiga area utama dalam *Indo-Pacific Treaty* tersebut sangatlah baik karena sesuai dengan konsep keamanan yang komprehensif dan kooperatif, sehingga dapat meningkatkan kerjasama keamanan dengan cara damai dan menghindari penggunaan kekerasan atau kekuatan militer untuk menyelesaikan atau mencegah masalah di dalam kawasan Indo-Pasifik.

Prospek dan Masalah dalam Mewujudkan Gagasan *Indo-Pacific Treaty*

Gagasan *Indo-Pacific Treaty* belum dapat dilaksanakan pada saat ini dikarenakan hanya ada sedikit indikasi untuk mewujudkannya dan juga terdapat kesan bahwa tidak banyak dorongan di

Indonesia terkait mewujudkan gagasan tersebut. Walaupun demikian, sebenarnya gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty* ini adalah kesempatan baik bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk menjadi bagian dalam membentuk norma dan institusi untuk keamanan di kawasan mereka. Oleh karena itu, walaupun masih sulit diwujudkan untuk saat ini, dapat dikatakan bahwa gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini merupakan jawaban atas komitmen yang dibutuhkan sesuai dengan konsep kerjasama keamanan dan menyediakan *balance of power* di kawasan Indo-Pasifik.

Selanjutnya, keraguan atas keberhasilan gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty* ini dapat dilihat dari tiga masalah yang ada dalam mewujudkannya, yakni: (1) dukungan dari negara-negara besar; (2) tidak adanya *blueprint*; dan (3) kelanjutan *Indo-Pacific Treaty* di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Untuk dapat mewujudkan gagasan *Indo-Pacific Treaty* dibutuhkan strategi yang tepat berupa tiga langkah sebagai berikut: (1) membangun kepercayaan dan keyakinan di antara negara-negara besar di kawasan; (2) menciptakan pemahaman bersama di antara negara-negara menengah dan berkembang yang memiliki lokasi strategis di dalam kawasan Indo-Pasifik seperti Indonesia, India dan Australia; (3) melembagakan arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini dapat diwujudkan dengan baik apabila strategi dan langkah-langkah dalam mewujudkannya

dijalankan sehingga gagasan tersebut dapat disepakati dan diterima oleh negara-negara di kawasan Indo-Pasifik di masa depan.

Apabila dikaitkan dengan pilihan konsep mengenai arsitektur keamanan di kawasan, gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty* ini jika nantinya diwujudkan dan disepakati oleh negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, akan menjadi pilihan arsitektur keamanan (1) “Perubahan” yang membentuk mekanisme keamanan yang baru dan terpisah dari mekanisme yang ada selama ini di kawasan; (2) “struktur tunggal” yang menggunakan struktur dan mekanisme baru yang berfungsi mengkoordinasikan dan mengimplementasikan mekanisme yang ada selama ini sehingga konsep keamanan yang menyeluruh termasuk di sektor-sektor selain militer, seperti politik, ekonomi, sosial dan lingkungan dapat tercapai melalui *Indo-Pacific Treaty* ini; dan (3) “komunitas keamanan” yang dapat direalisasikan dalam jangka panjang dan menginginkan keamanan kawasan menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara yang ada di kawasan Indo-Pasifik dan akan terdapat mekanisme damai yang disepakati untuk menyelesaikan perselisihan yang bukan dengan cara penggunaan kekuatan.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan analisis, maka dapat direkomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri RI untuk kembali mengkaji ulang keberadaan gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty* ini. Melihat tujuan yang ingin dihasilkan dari *Indo-Pacific Treaty* sangat baik untuk keamanan kawasan, maka sebaiknya Kemlu RI melaksanakan strategi dan langkah-langkah dalam menghimpun dukungan untuk mewujudkan gagasan ini. Dukungan tersebut berasal dari negara-negara besar dan negara berkembang lainnya di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Indonesia sebagai negara pemrakarsa gagasan ini harus dapat menyiapkan *blueprint* yang jelas dan terperinci mengenai *Indo-Pacific Treaty* ini, sehingga akan menjadi lebih mudah untuk menjelaskan kepada negara-negara di kawasan tentang pentingnya kawasan Indo-Pasifik memiliki sebuah komitmen keamanan dalam bentuk *Indo-Pacific Treaty*, dan karenanya akan lebih cepat untuk mendapatkan dukungan dari mereka untuk mewujudkan gagasan ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Acharya, A., & Tan, S. S. 2004. *Asia-Pacific Security Cooperation*. New York: M.E. Sharpe.
- Bandoro, B. 2014. *Indonesia dalam Lingkungan Strategis yang Berubah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bull, H. 1995. *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics* (2nd ed.). New York: Columbia University Press.
- Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Emmers, R. 2004. Security Cooperation in the Asia Pacific: Evolution of Concepts and Practices. In S. S. Tan, & A. Acharya, *Asia Pacific Security Cooperation*. New York: M.E. Sharpe.
- Griffiths, M., & O'Callaghan, T. 2002. *International Relations: The Key Concepts*. London: Routledge.
- Holsti, K. J. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis* (6th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
- Shor, J. R. 1993. *An Introduction to Political Geography* (2nd ed.). London: Routledge.
- Williams, P. D. 2008. Security Studies: An Introduction. In P. D. Williams, *Security Studies: An Introduction*. Oxon: Routledge.

Jurnal

- Aisarieva, A. 2012. "ASEAN and Security Institution: Focusing on ASEAN Regional Forum and the ASEAN Political-Security Community". <http://r-cube.ritsume.ac.jp/bitstream/10367/4743/1/51210617.pdf>, diunduh pada 23 Juli 2015.
- Hermann, C. F. 1990. "Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy". *International Studies Quarterly*. Vol. 34.No. 1.
- Modelski, G. 2009. "Long Cycles in Global Politics". (J. Wiener, & R. A. Schrire,

Eds.) *International Relations*. 2.

- Ram, V. 2015. "The Proposal for an Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation: A Critical Reassessment". *Journal of ASEAN Studies*. Vol.3. No.1.
- Randy, I. 2015. "Relevansi Konsep Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation dengan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Indo-Pasifik: Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia". Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri RI, [http://www.kemlu.go.id/pusdiklat/Documents/01%20Politik/Relevansi%20Konsep%20Indo-Pasific%20Treaty%20of%20Friendship%20and%20Cooperation%20\(Politik\).pdf](http://www.kemlu.go.id/pusdiklat/Documents/01%20Politik/Relevansi%20Konsep%20Indo-Pasific%20Treaty%20of%20Friendship%20and%20Cooperation%20(Politik).pdf), diunduh pada 26 Agustus 2015.

Website

- "About The ASEAN Regional Forum". (n.d.). ASEAN Regional Forum, <http://aseanregionalforum.asean.org/about.html>, diunduh pada 23 Juli 2015.
- "ASEAN Overview". (n.d.). from Association of Southeast Asian Nations: <http://www.asean.org/asean/about-asean/overview>, diunduh pada 23 Juli 2015.
- "Asia Defence Spending Projections". Big Talk Money, <https://bigtalkmoney.wordpress.com/2012/02/15/asia-defence-spending-projections/>, 15 February 2012, diunduh pada 24 Juli 2015.
- "China's Holdings of U.S. Treasuries - What Does The Future Hold?", 1 Maret 2012, Viable Opposition, <http://viableopposition.blogspot.com/2012/03/chinas-holdings-of-us-treasuries-what.html>, diunduh pada 24 Juli 2015.
- Georgieff, J. "An Indo-Pacific Treaty: An Idea Whose Time Has Come?", *The Diplomat*, <http://thediplomat.com/2013/05/an-indo-pacific-treaty-an-idea-whose-time-has-come/>, 17 Mei 2013, diunduh pada 11 Mei 2015.
- Liow, J. C. "What to make of Indonesia's

- Indo-Pacific Treaty”. The Straits Times, <http://www.straitstimes.com/news/opinion/more-opinion-stories/story/what-make-indonesias-indo-pacific-treaty-20141016>, 11 Mei 2015, diunduh pada 16 Oktober 2014.
- Mallarani, M. “Krisis Keamanan dan Eskalasi Politik di Asia Timur”. Jurnal Mallarani, <http://jurnalmallarani.blogspot.com/2014/01/krisis-keamanan-dan-eskalasi-politik-di.html>, 8 Januari 2014, diunduh pada 4 Mei 2015.
- Mian, A., & Sufi, A. “China and the Dangers of Debt”. House of Debt, <http://houseofdebt.org/2014/03/13/china-and-the-dangers-of-debt.html>, 13 Maret 2014, diunduh pada 24 Juli 2015.
- Natalegawa, M. 16 Mei 2013. “An Indonesia Perspective on The Indo-Pacific”. http://csis.org/files/attachments/130516_MartyNatalegawa_Speech.pdf, diunduh pada 11 Mei 2015.
- Rajendran, G. “Defence Budgets - Devil in The Detail”. The International Institute for Strategic Studies, <https://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2015-090c/february-8272/2014-top-defence-spenders-bb5d>, 24 Juli 2015, diunduh pada 11 Februari 2015.
- Sambhi, N. *Do We Need An Indo-Pacific Treaty?* The Strategist, <http://www.aspistrategist.org.au/do-we-need-an-indo-pacific-treaty/>, 8 Juli 2013, diunduh pada 18 September 2016.
- Sihite, E. *Indonesia Tak Mau Ada Kekuatan Dominan di Asia*. BeritaSatu.com, <http://www.beritasatu.com/asia/132049-indonesia-tak-mau-ada-kekuatan-dominan-di-asia-pasifik.html>, 16 Agustus 2013, diunduh pada 17 Agustus 2015.
- Yujuico, E. 2010. “The Real Story behind the South China Sea Dispute”. LSE Idea, http://www.lse.ac.uk/IDEAS/pdf/SEAPpdf/SA_southchinaseadispute.pdf, diunduh pada 28 April 2015.

